



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1529, 2013

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH. Dekonsentrasi. Kegiatan. Anggaran.
Pelaksanaan. Pedoman.**

**PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 10 /Per/M.KUKM/XII/2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia, perlu adanya pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Provinsi/D.I., dalam bentuk penyelenggaraan program dekonsentrasi dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dan dikelola secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dikelola SKPD/Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 - 2014;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal pusat di daerah.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing - masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014 ini bertujuan sebagai pedoman bagi dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dalam melaksanakan kegiatan yang didekonsentrasikan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014 ini melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat RPJMN periode 2010-2014, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. peningkatan akses terhadap sumber daya produktif;
- c. pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. penguatan kelembagaan koperasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

- a. membiayai transport perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), Kabupaten dan Kota ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. membiayai transport perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) sebanyak 3 (tiga) kali;

- c. membiayai perjalanan dinas dari Provinsi/ Daerah Istimewa (D.I), ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Dekonsentrasi (Rakor Dekon) sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. membiayai perjalanan dinas dari Provinsi/ Daerah Istimewa (D.I) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan.
- e. membiayai perjalanan dinas Bimbingan Teknis Perencanaan Penyusunan Anggaran dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) ke tempat penyelenggaraan yaitu:
 - (1) Provinsi Sumatera Utara meliputi: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Maluku, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur;
 - (2) Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi: Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Aceh, Bangka Belitung dan Bengkulu;
 - (3) Provinsi Maluku Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat dan Jawa Barat; dan
 - (4) Provinsi Jawa Timur meliputi: Provinsi Lampung, Riau, Jambi, Bali, Papua, Kepulauan Riau dan DKI. Jakarta dan D.I. Yogyakarta.
- f. membiayai perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), Kabupaten dan Kota ke tempat pelaksanaan Pra Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah yaitu: Provinsi Bali, D.I Yogyakarta, Papua dan Kepulauan Riau;
- g. membiayai pelaksanaan rapat koordinasi daerah di tingkat Provinsi/D.I, dengan peserta dari Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) kali;
- h. sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- i. monitoring dan pengawasan atas program-program strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh setiap Deputi, monitoring atas perkembangan nilai bantuan perkuatan yang dilaksanakan dari masing-masing Deputi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 dan Bantuan permodalan yang disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. honorarium Tim Enumerator *updating data base* Koperasi, sebanyak 2 (dua) orang;
- k. honorarium Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sebanyak 2 (dua) orang;

- l. membiayai perjalanan dinas Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dari daerah ke Jakarta dalam rangka rapat koordinasi SAP, 1 (orang) orang sebanyak 1 kali;
- m. membiayai perjalanan dinas Rapat Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka konsultasi, 1 (satu) orang sebanyak 1 kali;
- n. membiayai/fasilitasi mengikuti pameran *Small Medium Enterprise's* (SME) Festival;
- o. membiayai/memfasilitasi ruang promosi (*display*) di Gedung Smesco UKM Indonesia;
- p. membiayai fasilitasi Pameran/Pasar Rakyat;
- q. membiayai pelaksanaan pendataan, penyusunan direktori dan penyusunan data base Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/D.I, Kabupaten dan Kota;
- r. membiayai honorarium Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL); dan
- s. membiayai kegiatan operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Pasal 5

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk :

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. lain - lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari APBD.

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing - masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya.
- (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);

- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
- g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
- h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan
- i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014.

Bagian Kedua
Tertib Administrasi

Pasal 13

- (1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 14

Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur dan dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di Provinsi/D.I.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Inspektorat Kementerian.
- (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi/D.I atas pelaksanaan dan realisasi anggaran dekonsentrasi.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi/D.I mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

- (3) Gubernur Provinsi/D.I atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan secara periodik (bulanan, triwulan serta akhir tahun anggaran) pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan realisasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
 - c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2014, bagi daerah yang tidak melaksanakan Peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor : 10 / Per/M.KUKM/XI/2013

Tanggal : 20 Desember 2013

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014

NO	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah	PAGU 2014			
		REGULER	PPKL	PLUT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
1	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara	4.119.521.000	119.400.000	-	4.238.921.000
2	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan	3.368.298.000	385.800.000	-	3.754.098.000
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah	4.449.359.000	119.400.000	-	4.568.759.000
4	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau	4.125.753.000	119.400.000	-	4.245.153.000
5	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku	4.954.026.000	119.400.000	700.000.000	5.773.426.000
6	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten	4.099.878.000	119.400.000	-	4.219.278.000
7	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau	3.178.756.000	119.400.000	1.200.000.000	4.498.156.000
8	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	2.780.450.000	119.400.000	-	2.899.850.000
9	Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Jawa Timur	5.589.190.000	2.620.800.000	1.000.000.000	9.209.990.000
10	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.788.590.000	119.400.000	-	3.907.990.000
11	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara	3.270.671.000	119.400.000	700.000.000	4.090.071.000
12	Dinas Koperasi dan PKPM Provinsi Papua	5.326.452.000	119.400.000	700.000.000	6.145.852.000
13	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.497.084.000	119.400.000	-	3.616.484.000
14	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat	3.402.922.000	119.400.000	700.000.000	4.222.322.000
15	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta	2.286.245.000	119.400.000	-	2.405.645.000
16	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	4.388.031.000	119.400.000	-	4.507.431.000
17	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	5.319.130.000	1.578.600.000	1.200.000.000	8.097.730.000
18	Dinas Koperasi Provinsi Bali	3.602.243.000	772.200.000	700.000.000	5.074.443.000
19	Dinas Koperasi dan PUKM Provinsi Sulawesi Utara	3.486.458.000	119.400.000	-	3.605.858.000
20	Dinas Perindag Koperasi Provinsi D.I. Yogyakarta	3.724.665.000	119.400.000	700.000.000	4.544.065.000
21	Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Provinsi Sulawesi Tengah	3.349.675.000	119.400.000	-	3.469.075.000
22	Dinas Koperasi, Perindag Provinsi Sumatera Barat	2.762.393.000	509.400.000	-	3.271.793.000
23	Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Jambi	3.007.645.000	119.400.000	700.000.000	3.827.045.000
24	Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3.410.116.000	119.400.000	500.000.000	4.029.516.000
25	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.176.165.000	777.600.000	700.000.000	5.653.765.000
26	Dinas Perindag Koperasi Provinsi Kalimantan Timur	3.365.915.000	119.400.000	-	3.485.315.000
27	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan	4.715.137.000	1.056.600.000	1.200.000.000	6.971.737.000
28	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat	5.061.620.000	1.614.600.000	1.000.000.000	7.676.220.000
29	Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Bengkulu	2.983.801.000	361.800.000	-	3.345.601.000
30	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung	2.651.992.000	119.400.000	-	2.771.392.000
31	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan	3.225.294.000	584.400.000	500.000.000	4.309.694.000
32	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat	2.927.573.000	119.400.000	700.000.000	3.746.973.000
33	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat	2.925.884.000	119.400.000	-	3.045.284.000
	Jumlah	123.318.953.000	13.008.000.000	12.900.000.000	149.226.953.000